

361. C13  
MAD  
P  
1994



## LAPORAN HASIL PENELITIAN

JUDUL

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN  
TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA MASYARAKAT NELAYAN  
DI KEC. WIRADESA KABUPATEN DATI II PEKALONGAN**

OLEH :

Drs. H. Madyono JD, SH  
NIP. 130 189 366

Dra. Darosy Endah Hyoscyamina  
NIP. 131 917 471

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

---

DIBIYAI OLEH DANA DPP UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG,  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995, BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN TUGAS PENELITIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 615/PT09.H8/N/1994 TANGGAL 23 AGUSTUS 1994

LEMBAGA PENELITIAN UNDIP


1 9 9 4

## LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik pada Masyarakat Nelayan di Kec. Wiradesa, Kab. Dati-II Pekalongan
2. Kepala Proyek Penelitian
  - a. Nama lengkap : Drs.H.Madyono, JD, SH
  - b. Pangkat dan jabatan : IVB / Lektor Kepala
  - c. Pengalaman dalam bidang penelitian : Pengaruh Perubahan Dana Inpres Desa terhadap Pembangunan
  - d. Sedang mengadakan penelitian : Tidak
  - e. Tempat Penelitian
    - e.1. Laboratorium : -
    - e.2. Bagian : Pemerintahan
    - e.3. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Anggota Peneliti : Dra. Darosy Endah Hyoscyamina
4. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan
5. Dibiayai melalui Proyek : DPP Universitas Diponegoro Th. 1994 / 1995
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

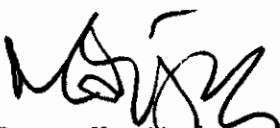
Semarang, 12 Desember 1994

Mengetahui :


 Pembantu Dekan FISIP  
Universitas Diponegoro

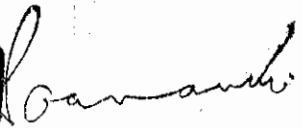
Y. Warella, MPA  
NIP. 130 227 811

Ketua Peneliti

  
Drs. H. Madyono Jd, SH  
NIP. 130 189 366

Mengetahui :

 Lembaga Penelitian UNDIP

  
DR. AG. Soemantri  
NIP. 130 237 480

## RINGKASAN

Kesadaran politik masyarakat merupakan fenomena yang sangat penting, karena hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kesadaran politik dimaksudkan sebagai daya tangkap masyarakat terhadap masalah - masalah kenegaraan yang mampu memberikan dorongan dan motivasi untuk ikut serta dalam memperrtahankan dan mengembangkan negara, oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan politik terlebih dahulu harus mempertinggi

tingkat kesadaran politik dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang apakah tingkat pendidikan mempengaruhi terhadap partisipasi politik pada masyarakat nelayan di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat nelayan dimana dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara langsung, observasi dan dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Penelitian ini mengambil responden sebanyak 50 orang nelayan dengan menggunakan teknik random sampling. Responden tersebut adalah kepala keluarga dengan status sebagai pertama nelayan juragan darat yaitu nelayan yang mempunyai modal (pemilik modal), kedua nelayan juragan laut yaitu nelayan yang memiliki modal akan tetapi ia juga merangkat sebagai tenaga kerja, jadi ia juga terjun ke laut, dan yang ketiga adalah nelayan buruh yaitu ne-

layan yang tidak memiliki modal, ia bekerja pada nelayan juragan darat maupun juragan laut.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Adapun untuk menguji hipotesa, digunakan uji statistik dengan rumus sebagai berikut :

- a. Untuk menguji hubungan antara variabel tingkat pendidikan (X) dengan variabel partisipasi politik (Y) digunakan rumus korelasi product moment, sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{xy}{\sqrt{(x^2)(y^2)}}$$

- b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor tingkat pendidikan terhadap tingginya partisipasi politik, menggunakan rumus koefisien determinan ( $R^2$ ) dengan rumus :

$$R^2 = r_{xy}^2 \times 100$$

- c. Untuk mengetahui besarnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap tingginya partisipasi politik dengan menggunakan rumus :

$$(1 - r^2) \times 100\%$$

Dari perhitungan-perhitungan statistik dengan rumus-rumus diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingginya partisipasi politik adalah positif dan signifikan, sedang besarnya koefisien korelasi adalah 0,606187
- b. Besarnya pengaruh faktor tingkat pendidikan terhadap tingginya partisipasi politik sebesar 36,75%
- c. Besarnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat pendidikan terhadap tingginya partisipasi politik sebesar 63,25%

## SUMMARY

A Society political consciousness is the most important phenomenon it is one of factors determinens people partisipation quality in state development.

This political consciousness means a people response of state problems that is able to motivate them in order to take part in defending and developing the state. Furthermore, to increase people participation in state development and political, first we have to increase their political consciousness. Considering that factor the write try to do a research about : Does education degree influence political participation at fisher society of Wiradesa subdistrict of Pekalongan Regency.

The type of this research is descriptif research that is done to describe the influence of education degree on political participation at fisher society with data collecting technics used are direct interview, observation and questioner.

This research takes 50 respondents of fisher society by using random sampling technic. The respondents are first, heads of household with status as Nelayan Juragan Darat; the fishers have financial capitals (investors), second Nelayan Juragan Laut is fishers have financial capitals and at the same time they become employees, The tird is Nelayan Buruh; the fishers have no financial capitals and work for Nelayan Juragan Darat or Juragan Laut.

Analysis ways used in this research are qualitatyf and quantitatif and the hypothesis examined by using statistic with a formula as follows :

- a. To examine a correlation between variable of education degree (X), and variable of political participation (Y)

used a formula of product moment correlation, that is :

$$r_{xy} = \frac{xy}{\sqrt{(x^2)(y^2)}}$$

- b. To detect degree of education factors influences on political participation, used a formula of coefficient determinant

$$R^2 = r_{xy}^2 \times 100$$

- c. To detect degree of other factors influence on political participation used a formula :

$$(1 - r^2) \times 100 \%$$

According to statistic account using those formulas obtained a result as follows :

- a. Correlation between degree of education and political participation is positive and significant with coefficient correlation 0,606187.
- b. Number of education factor influence on degree of political participation is 36,75%
- c. Number of other factors influence education factor on degree of political participation is 63,25%.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga penelitian berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Partisipasi Politik pada masyarakat nelayan di kecamatan Wiradesa, kabupaten daerah tingkat II Pekalongan dapat penulis selesaikan dengan baik.

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih kepada Rektor UNDIP dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP yang telah memberikan izin dan bantuannya demi terlaksananya penelitian ini.

Tak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada Bupati KDH Tingkat II Pekalongan, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di wilayahnya.

Dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Desember 1994

Penulis

## DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN PENGESAHAN -----	i
RINGKASAN -----	ii
SUMMARY -----	iv
KATA PENGANTAR -----	vi
DAFTAR ISI -----	vii
DAFTAR TABEL -----	ix
B A B      I. PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Permasalahan -----	1
B. Perumusan Masalah -----	3
C. Tinjauan Pustaka -----	3
D. Tujuan Penelitian -----	8
E. Kontribusi Penelitian -----	8
F. Metode Penelitian -----	9
1. Tipe Penelitian -----	9
2. Populasi dan Sampel -----	9
3. Teknik Pengumpulan data -----	9
4. Analisa Data -----	9
B A B      II. DESKRIPSI UMUM KECAMATAN WIRADESA, KABUPA-	
TEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN -----	10
A. Keadaan Geografis -----	10
B. Penduduk -----	16
C. Sosial -----	22
D. Deskripsi Responden -----	31
B A B      III. PENYAJIAN DATA -----	35
A. Variabel Tingkat Pendidikan (X) -----	35
B. Variabel Tingkat Partisipasi Politik (Y) -----	39



B A B	IV. ANALISA HUBUNGAN VARIABEL DAN PENGUJIAN HIPOTESA -----	50
B A B	V. PENUTUP -----	55
	A. Kesimpulan -----	55
	B. Saran - saran -----	56
	DAFTAR PUSTAKA -----	58
	QUESTIONER -----	59
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Luas tanah di wilayah Penelitian -----	12
Tabel 2	Luas tanah di wilayah Penelitian menurut Sistem Pengairan -----	14
Tabel 3	Pemakaian tanah di wilayah Penelitian ----	15
Tabel 4	Banyaknya Penduduk di wilayah Penelitian--	16
Tabel 6a	Penduduk 10 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan petani sendiri, buruh tani, nelayan -----	18
Tabel 6b	Penduduk 10 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan pedagang, angkutan, pegawai negeri -----	19
Tabel 6c	Penduduk 10 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan pensiun dan lainnya -----	21
Tabel 7a	Jumlah penduduk 5 th keatas menurut tingkat pendidikan AK/PT, tamat SLTA, tamat SLTP--	22
Tabel 7b	Jumlah penduduk 5 th keatas menurut tingkat pendidikan SD, tidak tamat SD -----	24
Tabel 7c	Jumlah penduduk 5Th keatas menurut yang be- lum tamat SD, tidak/belum sekolah -----	25
Tabel 8	Jumlah sekolah di wil. Penelitian -----	26
Tabel 9	Banyaknya pemeluk agama di wil. penelitian--	28
Tabel 10	Jumlah sarana peribadatan di wil. penelitian	29
Tabel 11	Pernah/tidaknya responden mengenal pendidik an formal -----	35
Tabel 12	Pendidikan terakhir responden -----	36
Tabel 13	Pendapat responden terhadap pendidikan yang ditempuh -----	36
Tabel 14	Pernah/tidaknya responen menempuh pendidikan non formal -----	37
Tabel 15	Motivasi responden dalam mengikuti pendidik an non formal -----	38

Tabel 16	Pendapat responden terhadap pendidikan non formal yang diikuti -----	39
Tabel 17	Tingkat pengetahuan responden terhadap Dasar Negara -----	40
Tabel 18	Tingkat kehafalan responden tentang teks Pancasila -----	40
Tabel 19	Tingkat pengetahuan responden terhadap UUD 1945 -----	41
Tabel 20	Pernah/tidaknya responden mengikuti pentaran tentang masalah kenegaraan/politik -----	41
Tabel 21	Tingkat pengetahuan responden terhadap GBHN	42
Tabel 22	Tahu/tidaknya responden mengenai kepanjangan Pelita -----	43
Tabel 23	Pendapat responden mengenai jalannya pem bangunan di Indonesia -----	43
Tabel 24	Pendapat responden mengenai kemampuan pemerintah dalam mewujudkan tujuan Negara--	43
Tabel 25	Pendapat responden mengenai kemampuan pemerintah dalam mewujudkan aspirasi rakyat	44
Tabel 26	Responden dalam menggunakan hak mengikuti Pemilu -----	45
Tabel 27	Pendapat responden terhadap usaha pembelaan negara sebagai hak dan kewajiban WN -----	46
Tabel 28	Responden di dalam memenuhi kewajiban membayar pajak -----	47
Tabel 29	Pendapat responden tentang tanggapan partisipasi masyarakat dapat mensukseskan jalannya pembangunan -----	48
Tabel 30	Pendapat responden mengenai partisipasi pembangunan sebagai kewajiban bagi setiap Warga negara -----	49

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pembangunan nasional berarti pembangunan bagi seluruh bangsa Indonesia dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, yaitu oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama. Untuk itu diperlukan partisipasi aktif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tinggi rendahnya partisipasi dari masyarakat diantaranya ditentukan oleh tingkat kesadaran terhadap kondisi dan situasi di sekitarnya baik mikro maupun makro, dalam hal ini adalah tingkat kesadaran politik yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Kesadaran politik masyarakat menjadi sangat penting karena hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kesadaran politik dimaksudkan sebagai daya tangkap masyarakat terhadap masalah kenegaraan yang mampu memberikan dorongan dan motivasi untuk ikut serta dalam mempertahankan dan mengembangkan negara. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terlebih dahulu harus mempertinggi tingkat kesadaran politik dalam masyarakat.

Pengertian politik yang dimaksud bukan dalam arti sempit atau politik secara praktis, melainkan politik dalam arti luas yang menyangkut segala hal kenegaraan yang dirumuskan dalam Pancasila, UUD 1945 dan GBHN.

Terbentuknya kesadaran politik dalam masyarakat pada hakekatnya dikarenakan setiap individu dalam masyarakat mengalami sosialisasi politik dan selanjutnya individu akan mendapatkan suatu keyakinan, perasaan dan komponen nilai terhadap pemerintahan dan kehidupan politik, melalui berbagai sarana sosialisasi politik yang ada misalnya : keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, kontak politik langsung, media massa dan sebagainya.

Dengan adanya sarana-sarana sosialisasi politik tersebut akan menentukan tingkat kesadaran politik dalam masyarakat. Sebab kesadaran merupakan suatu kondisi psikologis yang tanggap terhadap suatu hal. Kesadaran tumbuh tidak hanya oleh faktor dari dalam diri individu akan tetapi juga oleh faktor yang datangnya dari luar individu.

Dapat digarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat adanya ditentukan oleh kesadaran politik masyarakat, sedangkan kesadaran politik itu sendiri dipengaruhi oleh adanya sosialisasi politik dengan berbagai sarannya.

Dengan latar belakang masalah tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul :

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN DATI II PEKALONGAN.

Penentuan masyarakat nelayan sebagai obyek penelitian mendasarkan pada asumsi bahwa dalam kenyataannya masyarakat nelayan dikenal sebagai masyarakat pariferial bila ditinjau dari sudut sosial ekonomi. Keadaan ini akan membawa konsekuensi pada relatif rendahnya tingkat kesadaran politiknya, karena rendahnya kemampuan daya serap dan daya tanggapnya terhadap permasalahan politik yang mana berkaitan dengan tingkat pendidikan yang diperoleh, dan juga tidak lepas dari lingkungan yang mengitarinya.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Kesadaran politik berhubungan dengan masalah pemahaman dan tanggapan, sehingga hal ini berkaitan dengan pendidikan serta lingkungan yang mengitarinya, yang akan membawa pada terbentuknya kesadaran politik individu dan masyarakat.

Tingkat pendidikan yang tinggi akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kesadaran politik masyarakat. Sebab semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin luas pengetahuannya mengenai masalah-masalah negara yang diperoleh dari pendidikan formal di sekolah, kecuali itu mereka akan lebih mampu dalam menganalisa dan menanggapi suatu keadaan.

Dari uraian di atas maka masalah yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Sejauh mana hubungan (korelasi) antara tingkat pendidikan dan kesadaran politik.
- b. Sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik.

## C. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan politik terutama yang menyangkut masalah peranan warga negara dan standart kesetiaan serta keterlibatan masyarakat yang meliputi perluasan partisipasi massa merupakan bagian yang sah dari perkembangan politik.

Secara konstitusional dan dasariah aspirasi masyarakat dalam bidang politik dirumuskan secara jelas dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya terutama pasal 27, 28, dan 30 yaitu :

- a. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- d. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- e. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan UU ( UUD 1945 ).

Pembangunan politik dalam GBHN menyatakan " Peningkatan kesadaran bernegara bagi seluruh rakyat sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila " ( Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 ).

Perjalanan suatu bangsa dalam proses pendewasaan dirinya tidak selalu mulus jalannya seperti yang diharapkan, akan tetapi seringkali perkembangannya itu dihadapkan pada berbagai macam tantangan yang kadang-kadang dapat membahayakan eksistensi bangsa tersebut.

Demikian pula bangsa Indonesia sebagai negara yang berkadar heterogenitas tinggi, baik dari segi etnik, status sosial, agama, status ekonomi, tingkat pendidikan, wilayah maupun lainnya, maka hal ini tentunya mengakibatkan kemajemukan budaya politiknya.

Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dialami oleh masing-masing individu berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai latar belakang dan sarana sosialisasi yang digunakan.

Sosialisai berlangsung terus menerus selama hidup seseorang serta dapat berujud transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tidak langsung.

Menurut G.A. Almond sosialisasi politik ini di-  
lankan melalui bermacam-macam lembaga, seperti pelajaran  
kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Lainnya seperti  
kelompok bergaul, bekerja hanya cenderung untuk mempe-  
ngaruhi secara tidak langsung. ( Mochtar Mas'ud, 1984 )  
Kemudian ia menyebutkan beberapa sarana sosialisasi  
politik seperti keluarga, sekolah, kelompok pergaulan,  
pekerjaan, media massa dan kontak-kontak politik lang-  
sung.

Jadi disadari atau tidak sebenarnya sosialisasi politik  
itu sudah berlangsung sejak kita masih kecil dan semua  
masyarakat secara langsung atau tidak langsung mengalami  
proses sosialisasi itu, dan melalui proses sosialisasi  
ini anggota masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati  
nilai-nilai politik tertentu sehingga akan mempengaruhi  
tingkah laku dan sikap politik sehari-hari.

Proses sosialisasi politik juga dapat ditujukan  
untuk mengubah sosialisasi yang telah ada, yaitu dengan  
sengaja melakukan pemasukan nilai-nilai politik baru  
untuk menggantikan nilai-nilai lama yang sudah ada guna  
mengarahkan masyarakat ke jurusan tertentu, misalnya  
mengarahkan masyarakat ke suatu sikap dan tingkah laku  
yang lebih demokratis.

Dari usaha-usaha yang secara sadar itu, Alfian  
memberikan pengertian bahwa " Pendidikan politik dapat  
diartikan sebagai suatu usaha yang sadar untuk mengubah  
suatu sosialisasi masyarakat sehingga mereka mampu mema-  
hami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkan-  
dung dalam suatu sistim politik yang ideal yang hendak  
dibangun ". ( Alfian, DR, 1983 ).

Menurut Alfian proses perkembangan sifat atau  
tingkat partisipasi masyarakat dalam politik, dapat  
dianggap sebagai salah satu ukuran yang sangat penting  
dalam menentukan arah dan pertumbuhan suatu sistim poli-



tik yang sedang dibangun. ( Alfian, DR, 1977 ).

Ia menegaskan bahwa ada dua faktor yang menentukan sifat atau tingkat partisipasi masyarakat dalam berpolitik, yaitu tingkat pengetahuan atau kesadaran politik masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistim politik yang berlaku.

Daryatmo mengatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan daya tanggap seseorang, sehingga apabila yang akan ditingkatkan adalah kesadaran politik, maka ini bahwa daya tanggap terhadap politik harus ditingkatkan.

( Daryatmo, 1982 ).

Dalam hal ini pengertian pendidikan dapat dibedakan menjadi pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berstruktur mempunyai jenjang / tingkat dalam periode tertentu, berlangsung dari sekolah dasar sampai universitas dan tercakup dalam studi akademis umum, juga perguruan dan lembaga untuk latihan teknis profesional. Sedangkan pendidikan non formal adalah suatu bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja dan sistematis ( biasanya di luar sistem sekolah dan sistem pendidikan formal ) dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan, materi yang diberikan, proses belajar mengajar yang dipakai dan fasilitas yang digunakan serta tenaga pengajar disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan peserta didik ( cleentela ) dan kebutuhan lingkungan masyarakat sekitarnya.

( Melayu Sp. Hasibuan, 1985 ).

Dari pengertian dan batasan mengenai pendidikan di atas menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi pengetahuan, pengalaman, kecakapan dan ketrampilan tentang suatu hal.

Dengan demikian pendidikan merupakan suatu wahana yang amat penting dalam mengenalkan nilai-nilai politik, keyakinan-keyakinan, perasaan-perasaan terhadap pemerin-

tah dan kehidupan politik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar dapat menjadi insan-insan politik yang sadar akan hak dan kewajiban-kewajibannya, karena pendidikan akan membentuk sikap-sikap terhadap konsep-konsep seperti wewenang, demokrasi ataupun kewajiban politik masyarakat.

Proses sosialisasi politik dengan berbagai sarananya sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mengarahkan pada pembangunan politik bangsa, dimana hal ini diperlukan untuk suatu kesadaran politik masyarakat tersebut.

Kesadaran merupakan suatu kondisi psikologis yang tanggap terhadap suatu hal. Dan yang dimaksud dengan politik adalah politik dalam arti luas, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Menurut Daryatmo kesadaran politik merupakan kondisi psikologis yang tanggap terhadap hal ihwal negara.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesadaran politik adalah kesadaran bernegara.

Kesadaran politik ini dapat diukur dari komponen-komponen sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan daya tanggap masyarakat terhadap Pancasila
2. Pengetahuan dan daya tanggap masyarakat terhadap UUD 1945
3. Pengetahuan dan daya tanggap masyarakat terhadap GBHN
4. Perasaan keterikatan dan keterlibatan masyarakat kepada negara berupa kepercayaan dan harapan terhadap pemerintah dan pembangunan, partisipasi dalam penggunaan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

#### D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasar kerangka pemikiran tersebut di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

##### 1. Tujuan Umum.

Untuk mengetahui apakah dalam kesehari-hariannya itu masyarakat benar-benar tahu mengenai masalah negara, seperti Pancasila, UUD 1945 dan GBHN berupa teori-teori yang telah mereka kenal, pahami dan diamalkannya.

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik pada masyarakat nelayan di Kec. Wiradesa Kabupaten Dati II Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui kesadaran politik yang dimiliki oleh masyarakat nelayan di Kec. Wiradesa Kabupaten Dati II Pekalongan.

#### E. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap pemerintah Indonesia dalam hal-hal :

1. Memberi masukan kepada pemerintah mengenai adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik masyarakat.
2. Sebagai masukan dalam menentukan strategi pembinaan terhadap peningkatan kesadaran politik pada masyarakat nelayan di Kec. Wiradesa Kabupaten Dati II Pekalongan.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Type penelitian

Penelitian deskriptif, artinya penelitian ini menggambarkan keadaan secara terperinci tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik masyarakat nelayan di Kec. Wiradesa Kabupaten Dati II Pekalongan.

### 2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat di Kec. Wiradesa Kabupaten Dati II Pekalongan. Sampelnya ditentukan dengan penggunaan teknik random sampling sejumlah 50 responden.

### 3. Teknik pengumpulan data

a. Studi pustaka

b. Penelitian lapangan yang meliputi :

- observasi

- questioner

- wawancara

### 4. Analisa data

a. Kualitatif

b. Kuantitatif dengan teknik uji statistik korelasi product moment.